



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 21 November 2019

Halaman: 13

## Sultan: Izin Hotel Harus Selektif

● SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pemberian izin untuk pembangunan hotel di wilayahnya harus lebih selektif. Hal itu ia tujujkan kepada seluruh bupati dan wali kota di DIY.

"Harapan saya kepada bupati dan wali kota, hati-hati untuk memberikan izin membangun hotel," kata Sultan di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta, Selasa (19/11).

Terlebih, ia mengatakan pada Maret 2020 nanti Yogyakarta International Airport sudah dapat diresmikan. Hal itu tentu membuka ruang investasi yang lebih besar. Namun, peresmian tersebut, kata dia, tidak lantas harus dengan membuka semua pintu investasi. Terutama untuk pembangunan hotel.

"Karena bagaimana pun hotel-hotel di Yogya (DIY) itu, di luar hari libur dan *weekend* baru kira-kira 50 sampai 55 persen saja yang bisa memenuhi target," katanya.

Sultan pun mengatakan, jika semua ruang investasi dibuka untuk pembangunan hotel bisa menyebabkan kerugian. Ia memastikan, butuh waktu satu hingga tiga tahun bagi pariwisata DIY untuk berkembang.

"Untuk investasi, tidak berarti begitu airport dibuka, bisa terjadi pembangunan-pembangunan hotel yang luar biasa. Itu akan rugi semua, harus hati-hati. Jangan sampai mengizinkan pembangunan hotel hanya untuk merugi," jelasnya.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), juga mengimbau pemerintah DIY harus hati-hati dalam memberikan izin pendirian hotel. Terlebih dengan adanya YIA yang dapat membuka investasi yang lebih besar, terutama dalam pendirian perhotelan.

Humas PHRI DIY, Dedy Pranowo mengatakan, YIA belum bisa menjamin meningkatnya kunjungan wisatawan. Termasuk meningkatkan okupansi hotel. "Gambaran nyata yang ada, tingkat hunian yang 50-60 persen ini memang harus hati-hati dalam pemberian izin hotel baru," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan okupansi hotel membutuhkan waktu setidaknya dua hingga tiga tahun. Yang mana, juga perlu langkah yang tepat untuk mencapai sasaran yang sesuai. "Hal ini butuh proses waktu 2-3 tahun lagi dengan membuat promosi ke luar negeri dengan cara yang tepat sasaran," katanya.

Ia pun juga berharap Pemda DIY, termasuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di DIY melakukan pengawasan. Yakni terhadap munculnya hotel-hotel baru yang tidak berizin. "Hal ini dibarengi dengan pengawasan dari pemda untuk munculnya hotel-hotel non-bintang baru yang tidak berizin, serta kos-kosan atau pondokan yang juga bisa menerima harian atau beralih fungsi," katanya. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
.....	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005